

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-perorangan atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan (UU No. 25/1992). Di Indonesia, koperasi yang pertama kali berdiri bergerak di bidang perkreditan, karena menyesuaikan dengan kondisi masyarakat yang terjerat oleh lintah darat (Siregar, 2019). Koperasi memiliki fungsi untuk membangun, mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.

Kinerja koperasi diartikan sebagai suatu ketercapaian terhadap pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Istilah kinerja berasal dari kata *Job Performance* atau *Actual Performance* yang berarti prestasi kinerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang (Bulandari, 2015). Dengan demikian, pengukuran kinerja koperasi merupakan suatu upaya yang diambil para pemangku kepentingan untuk menentukan/menilai pencapaian suatu strategi terhadap suatu target. Untuk mencapai suatu keberhasilan kinerja harus adanya faktor pendukung diantaranya adalah *good corporate governance* dan modal sosial.

Good corporate governance menurut Thomas (2006) merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang menciptakan nilai tambahan (*value added*) untuk semua *stakeholder*. Menurut Purwani (2010), jika pelaksanaa

good corporate governance tersebut dapat berjalan dengan efektif dan efisien, maka seluruh aktifitas perusahaan akan berjalan dengan baik, sehingga kinerja perusahaan baik yang bersifat finansial maupun non finansial akan juga turut membaik. *Good corporate governance* memiliki beberapa prinsip, dan prinsip-prinsip *good corporate governance* dapat diterapkan pada setiap aspek bisnis dan semua jajaran perusahaan. Prinsip-prinsip *good corporate governance* yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran (Bulandari,2015).

Transparansi dapat mempengaruhi kinerja perusahaan, transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang dalam suatu perusahaan untuk memperoleh informasi sehingga dapat menjaga objektivitas bisnisnya, perusahaan harus menyediakan informasi dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya yang diisyaratkan oleh peraturan perundang undangan, untuk mengambil keputusan oleh pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya.

Transparansi sangatlah berpengaruh terhadap kinerja perusahaan hal ini dapat dilihat dari penelitian yang dilakukan oleh Evi (2018), Utari dan Yeni (2017), menyatakan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah, hasil yang sama juga diperoleh dari penelitian Novatiani (2019) dan Daniel (2014) menemukan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai perusahaan. Namun transparansi juga memiliki pengaruh yang kurang baik terhadap kinerja perusahaan hal ini dibuktikan dalam penelitian yang dilakukan oleh Dito (2018) dan Erick (2018) bahwa transparansi berpengaruh

negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah dan hasil yang bertentangan diperoleh oleh Desi dan Pande (2017), Rosy (2014) bahwa transparansi tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan.

Faktor berikutnya yang diduga mempengaruhi kinerja perusahaan adalah akuntabilitas, akuntabilitas merupakan pemberian pertanggungjawaban kepada anggota perusahaan dalam mempertanggungjawabkan kinerjanya dan sehingga terbentuknya kondisi saling mengawasi di dalam suatu perusahaan, untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, teratur, dan sesuai dengan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Menurut penelitian sebelumnya dilakukan oleh Utari dan Yeni (2017), Desi dan Pande (2017), Daniel (2014) hasil penelitiannya menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah, sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Erick (2018) dan Dito (2018) hasil penelitiannya menyatakan akuntabilitas berpengaruh negatif terhadap kinerja pegawai, dan menurut penelitian yang dilakukan oleh Rosy (2014) bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan perusahaan.

Selanjutnya faktor yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan adalah tanggungjawab, tanggungjawab merupakan keharusan perusahaan untuk menaati peraturan perundang-undangan. Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan. Penelitian yang dilakukan oleh Diah dan Asri (2016), Numaria dan restu (2015) menyatakan bahwa tanggungjawab berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Jayanti (2016) menemukan bahwa adanya pengaruh negatif terhadap kinerja (PT Pos Indonesia

Persero) dan menurut penelitian yang dilakukan oleh Desi dan Pande (2017) bahwa tanggung jawab tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan.

Faktor selanjutnya adalah independensi yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan, independensi adalah bentuk suatu perusahaan yang tidak memiliki keterkaitan dengan pihak manapun. Untuk melancarkan pelaksanaan *good corporate governance*, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi intervensi oleh pihak lain. Penelitian yang dilakukan oleh Nurmaria dan Restu (2015), Desi dan Pande (2017), Diah dan Asri (2016) menyatakan independensi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Jayanti (2016) menyatakan bahwa independensi berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan dan menurut penelitian yang dilakukan oleh Krishna (2017) bahwa independensi tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD).

Faktor kewajaran diduga dapat mempengaruhi kinerja perusahaan karena kewajaran adalah suatu perusahaan yang harus memperhatikan kepentingan pihak-pihak yang berkaitan dengan perusahaan. Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan kepentingan lainnya, berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan, penelitian yang dilakukan oleh Diah dan Asri (2016), Numaria dan restu (2015) menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Jayanti (2016) menyatakan bahwa terdapat pengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan dan menurut

penelitian yang dilakukan oleh Desi dan Pande (2017) bahwa kewajaran tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan.

Modal sosial merupakan suatu serangkaian nilai atau norma-norma informasi yang dimiliki bersama diantara anggota suatu kelompok masyarakat yang saling berinteraksi dan modal sosial dapat mempengaruhi kinerja perusahaan, sedangkan menurut Fukuyama (1995) dalam Supriyono (2010) mendefinisikan modal sosial sebagai serangkaian nilai-nilai atau norma-norma informal yang dimiliki bersama di antara para anggota suatu kelompok yang memungkinkan terjalinnya kerja sama di antara mereka, penelitian yang dilakukan oleh Oka dan Widnyana (2018) menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif modal sosial terhadap kinerja usaha pada UD.Udiana Ds Celuk, Gianyar Bali, hasil yang sama juga diperoleh dari penelitian Tommy (2017), Yosua (2013) dan Layla (2014) menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif modal sosial terhadap kinerja perusahaan, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Abdi (2019) menyatakan bahwa terdapat pengaruh negatif modal sosial terhadap kinerja pada UMKM Rumah Makan dan penelitian yang dilakukan oleh Eva Rusdiana dan Dewie (2014) menyatakan bahwa modal sosial tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang masih terdapat perbedaan hasil penelitian maka peneliti tertarik mengkaji kembali pengaruh transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, kewajaran dan modal sosial terhadap kinerja Koperasi di Kecamatan Tegallalang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1) Apakah transparansi berpengaruh terhadap kinerja Koperasi di Kecamatan Tegallalang?
- 2) Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja Koperasi di Kecamatan Tegallalang?
- 3) Apakah responsibilitas berpengaruh terhadap kinerja Koperasi di Kecamatan Tegallalang?
- 4) Apakah independensi berpengaruh terhadap kinerja Koperasi di Kecamatan Tegallalang?
- 5) Apakah kewajaran berpengaruh terhadap kinerja Koperasi di Kecamatan Tegallalang?
- 6) Apakah modal sosial berpengaruh terhadap kinerja Koperasi di Kecamatan Tegallalang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh transparansi terhadap kinerja Koperasi di Kecamatan Tegallalang.
- 2) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja Koperasi di Kecamatan Tegallalang.
- 3) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh responsibilitas terhadap kinerja koperasi di Kecamatan Tegallalang.

- 4) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh independensi terhadap kinerja Koperasi di Kecamatan Tegallalang.
- 5) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh kewajaran terhadap kinerja Koperasi di Kecamatan Tegallalang.
- 6) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh modal sosial terhadap kinerja Koperasi di Kecamatan Tegallalang.

1.3 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yang berarti dalam aspek teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan bukti secara empiris terhadap keagenan yaitu menjelaskan bahwa hubungan keagenan merupakan kontrak antar pihak principal dengan pihak agen, yang mana pihak agen memberikan pelayanan dan tanggung jawab kepada pihak principal dan untuk melakukan semua kegiatan atas nama principal, pemilik perusahaan dapat membatasi perbedaan kepentingannya dengan menetapkan intensif yang tepat bagi agen, dan dengan menimbulkan biaya monitoring, rancang untuk membatasi tindakan agen secara teoritis. Dan memberikan tambahan suatu ilmu pengetahuan yang lebih luas mengenai kinerja koperasi di Kecamatan Tegallalang di tinjau dari *good corporate governance* dan modal sosial. Penelitian yang dilakukan juga diharapkan dapat memberikan bukti empiris dan mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan.

2) Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan memberikan sumbangan gagasan sebagai pertimbangan dalam mengembangkan koperasi dan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, sehingga mampu meningkatkan kualitas yang bagus untuk meningkatkan kinerja sehingga mutu dan tujuan koperasi yang diharapkan dapat terwujud.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan

Mecking dan Jemen (1976) menjelaskan bahwa hubungan keagenan merupakan kontrak antar pihak *principal* dengan pihak agen, yang mana pihak agen memberikan pelayanan dan tanggung jawab kepada pihak *principal*. Menurut Eisenhardt (1989) teori keagenan merupakan hubungan keagenan, yang mana pihak *principal* memberikan pihak gen untuk melakukan semua kegiatan atas nama *principal*. Menurut teori keagenan, pemilik perusahaan dapat membatasi perbedaan kepentingannya dengan menetapkan intensif yang tepat bagi agen, dan dengan menimbulkan biaya monitoring, rancang untuk membatasi tindakan agen (Hill dan Jones, 1992). Menurut Reny (2012), para manager diberi kekuasaan oleh pemilik, yaitu pemegang saham, untuk membuat keputusan, yang dapat menciptakan konflik kepentingan yang dikenal dengan teori keagenan (*Agency theory*).

Tujuan utama dengan adanya teori keagenan adalah untuk menjelaskan bagaimana pihak-pihak yang melakukan hubungan kontrak dapat mendesain kontak yang tujuannya untuk meminimalisir *cost* sebagai dampak adanya informasi yang tidak simentris dan kondisi yang megalami ketidakpastian (Eka, 2011).

Teori keagenan menggambarkan bahwa perusahaan merupakan suatu titik temu antara pemegang saham dan manajer. Tujuan perusahaan adalah

memaksimalkan kemakmuran harga saham yang diterjemahkan sebagai memaksimalkan harga saham. Dalam kenyataan tidak jarang manajer mempunyai tujuan lain yang mungkin bertentangan dengan tujuan utama tersebut karena manajer diangkat oleh pemegang saham maka idealnya mereka bertindak yang terbaik untuk pemegang saham. Namun dalam prakteknya sering terjadi konflik antar belah pihak tersebut yang dinamakan *agency problem* (Utari, 2016)

Corporate governance yang merupakan konsep didasarkan pada teori keagenan, diharapkan bisa berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan kepada anggota dan calon anggota beserta para nasabah bahwa mereka akan memberikan *return* atas dana yang telah mereka investasikan. *Corporate governance* berkaitan dengan bagaimana para anggota dan nasabah yakin bahwa pengelolaan koperasi tidak akan mencuri atau menggelapkan atau menginvestasikan ke dalam proyek-proyek yang tidak berkaitan dengan dana atau kapital yang telah ditanam oleh para anggota dan nasabah, dan berkaitan dengan bagaimana para anggota dan nasabah mengontrol para pengelola koperasi, dengan kata lain *Corporate Governance* diharapkan dapat berfungsi untuk menekan atau menurunkan biaya keagenan (*agency cost*) (Jayanti, 2015).

2.1.2 Good Corporate Governance

Terdapat beberapa pemahaman tentang pengertian *Corporate Governance* yang dikeluarkan oleh beberapa pihak baik dalam perspektif yang sempit (*shareholder*) dan perspektif yang luas (*stakeholder*) namun pada umumnya suatu pengertian yang sama. Menurut Oliver (1995), *Corporate Governance* muncul dalam organisasi disebabkan karena adanya masalah agensi, atau konflik kepentingan, yang melibatkan anggota organisasi.

Menurut *Organizational for economic co-operation and Development* (OECD, 1999), *Corporate Governance* merupakan elemen kunci dalam meningkatkan efisiensi ekonomis, yang meliputi serangkaian hubungan antar manajemen perusahaan, dewan direksinya (dewan direksi dan komisaris, untuk negara-negara yang menganut sistem hukum *two-tier* termasuk Indonesia), para pemegang saham dan *stakeholder* lainnya. *Good Corporate Governance* harus memberikan insentif yang tepat untuk dewan direksi dan manajemen dalam rangka mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan dari kepentingan perusahaan dan para pemegang saham dan juga harus dapat memfasilitasi monitoring yang efektif, sehingga mendorong perusahaan untuk menggunakan sumber daya secara efisien.

Konsep GCG mengacu pada peraturan dan standar yang mendefinisikan hubungan antara manajemen perusahaan dan pemangku kepentingan yang terkait dengan perusahaan seperti karyawan, pemasok, kreditur, konsumen, pemegang saham, pemegang obligasi (Kim, 2006).

Menurut Thomas (2006), *Good Corporate Governance* secara definisi merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang menciptakan nilai tambahan (*value added*) untuk semua *stakeholder*. Sheifer dan Vishny (1997) menyatakan *corporate governance* berkaitan dengan cara atau mekanisme meyakinkan para pemilik modal dalam memperoleh *return* yang sesuai dengan investasi yang telah ditanam. Menurut Purwani (2010), jika pelaksanaan *Good Corporate Governance* tersebut dapat berjalan dengan efektif dan efisien, maka seluruh aktifitas perusahaan akan berjalan dengan baik,

sehingga kinerja perusahaan baik yang bersifat finansial maupun non finansial akan juga turut membaik.

2.1.3 Tujuan dan Manfaat *Good Corporate Governance*

Penerapan sistem *Good Corporate Governance* diharapkan dapat meningkatkan nilai tambahan bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) melalui tujuan berikut:

- 1) Meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan kesinambungan suatu organisasi yang memberikan kontribusi kepada terciptanya kesejahteraan pemegang saham, pegawai dan *stakeholder* dan merupakan solusi yang elegan dalam menghadapi organisasi kedepan.
- 2) Meningkatkan legitimasi organisasi yang dikelola dengan terbuka, adil, dan dapat ditanggungjawabkan.
- 3) Mengakui dan melindungi hak dan kewajiban para *stakeholder* dan *shareholder*.

Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI, 2001)

dengan melaksanakan *corporate governance*, ada beberapa manfaat yang bisa diperoleh antara lain:

- a) Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional, serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *stakeholder*.
- b) Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah.
- c) Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia

d) Pemegang saham akan merasa puas akan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan *shareholder value* dan dividen.

Dengan *corporate governance* yang baik, keputusan-keputusan penting perusahaan tidak lagi hanya ditetapkan oleh satu pihak yang dominan, akan tetapi ditetapkan mendapatkan masukan dan dengan mempertimbangkan kepentingan berbagi pihak yang berkepentingan.

2.1.4 Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*

Good Corporate Governance memiliki beberapa prinsip, dan prinsip-prinsip *corporate governance* ini dipastikan dapat diterapkan pada setiap aspek bisnis dan semua jajaran perusahaan. Prinsip-prinsip *corporate governance* yaitu *transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran* di perlukan untuk mencapai yang berkesinambungan dengan memperhatikan kepentingan pihak yang berkepentingan (Bulandari, 2015). Menurut pedoman umum *Good Corporate Governance* Indonesia (2016), *good corporate governance* memiliki 5 prinsip sebagai berikut:

1) Transparansi

Untuk menjaga obyektifitas dalam menjalankan bisnis, prinsip ini mewajibkan perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya.

Perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, jelas dan akurat sehingga mudah di akses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya. Karena dengan tersedianya informasi yang tepat waktu, maka masyarakat pada umumnya dan pihak berkepentingan lain dapat sekaligus mengawasi perusahaan. Sehingga kebijakan yang dibuat dapat mencegah terjadinya kecurangan. Begitu pula apabila perusahaan menerapkan prinsip transparansi maka akan meningkatkan kepercayaan *stakeholder*.

2) Akuntabilitas

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan persyaratan yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan. Dengan cara harus menetapkan rincian dan tugas dari masing-masing organisasi.

Dan juga perusahaan harus memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelola perusahaan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan yang didelegasikan dalam menjamin kewenangan yang searah pada pencapaian tujuan yang secara luas dengan tingkat efesiensi, efektifitas dan kejujuran sehingga dengan itu kepercayaan *stakeholder* akan menjadi meningkat.

3) Responsibilitas

Responsibilitas tanggung jawab setiap individu maupun organisasi atau perusahaan dalam mematuhi segala tugas-tugasnya dalam pekerjaan, aturan-

aturan serta kebijakan-kebijakan pemerintahan yang berkaitan dengan kegiatan bisnis suatu organisasi atau perusahaan. Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka waktu panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

Sehingga dalam konsep ini, organisasi atau perusahaan harus mempertanggung jawabkan segalan hal yang berkaitan dengan aturan, hukum dan peraturan yang berlaku sebagai kontribusi hubungan hierarki internal perusahaan, pemangku kepentingan, masyarakat serta *stakeholder* lainnya. Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan.

4) Independensi

Independensi sikap perusahaan yang tidak memiliki keterkaitan dengan pihak manapun. Dalam melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara indenpenden sehinga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Dan juga dapat dijadikan sebagai aktualisasi diri untuk organisasi perusahaan yang dapat berdiri sendiri dan memiliki daya saing dengan lingkungan bisnisnya.

Dalam hal ini organisasi atau perusahaan harus memiliki tata kelola yang efektif dan efisien dan mampu melakukannya sendiri tanpa ada dominasi dari pihak lain, serta mampu dalam menggunakan dan memanfaatkan nilai-nilai yang ada pada organisasi atau perusahaan itu sendiri, untuk dapat dijadikan *unique point* diantara organisasi dan perusahaan lainnya. Maka untuk melancarkan

pelaksanaan *Good Corporate Governance*, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi intervensi oleh pihak lain.

5) Kewajaran

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Artinya perusahaan memperhatikan kepentingan pihak-pihak yang berkaitan dengan perusahaan. Konsep ini diperlukan untuk menjaga stabilitas perusahaan dengan menjaga kewajaran dan kesetaraan bagi setiap anggota, pemangku kepentingan dan *stakeholder* lainnya dalam suatu organisasi atau perusahaan dengan prinsipnya masing-masing. Karena setiap bagian dalam organisasi atau perusahaan memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi untuk organisasi atau perusahaan.

Sehingga kewajaran ini sangat penting untuk mendapatkan kepercayaan atau sebagai motivasi bagi setiap bagian dari organisasi atau perusahaan, karena mereka akan memiliki rasa dan kesempatan yang sama dalam memberikan kontribusi kepada organisasi. Perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

2.1.5 Modal Sosial

Konsep modal sosial muncul dari pemikiran bahwa anggota masyarakat tidak mungkin dapat secara individu mengatasi berbagai masalah yang dihadapi

diperlukan adanya kebersamaan dan kerjasama yang baik dari segenap anggota masyarakat yang berkepentingan untuk mengatasi masalah tersebut. Pemikiran seperti inilah yang pada awal abad ke 20 mengilhami seorang pendidik di Amerika Serikat bernama Lyda Judson Hanifan untuk memperkenalkan konsep modal sosial pertama kalinya. Dalam tulisannya berjudul *'The Rural School Community Centre'* (Syahra, 2003: 2) mengatakan modal sosial bukanlah modal dalam arti biasa seperti harta kekayaan atau uang, tetapi lebih mengandung arti kiasan, namun merupakan modal nyata yang penting dalam hidup bermasyarakat. Modal sosial termasuk kemauan baik, rasa bersahabat, saling simpati, serta hubungan sosial dan kerjasama yang erat antara individu dan keluarga yang membentuk suatu kelompok sosial.

Definisi modal sosial adalah kapabilitas yang muncul dari kepercayaan umum di dalam sebuah masyarakat atau bagian-bagian tertentu dari masyarakat tersebut. Selain itu, konsep ini juga diartikan sebagai serangkaian nilai atau norma informal yang dimiliki bersama di antara para anggota suatu kelompok yang memungkinkan terjalinnya kerjasama.

Modal sosial sebagai serangkaian nilai-nilai atau norma-norma informal yang dimiliki bersama di antara para anggota suatu kelompok yang memungkinkan terjalinnya kerja sama di antara mereka. Sejalan dengan Fukuyama, Partha dan Ismail mendefinisikan modal sosial sebagai hubungan-hubungan yang tercipta dan norma-norma yang membentuk kualitas dan kuantitas hubungan sosial dalam masyarakat dalam spectrum yang luas, yaitu sebagai perekat sosial (*social glue*) yang menjaga kesatuan anggota kelompok secara bersama-sama (Cendani, 2015: 151).

Menurut Putnam (2011) modal sosial adalah *public good*, bukan milik pribadi untuk mendapatkan keuntungan dari modal tersebut. Putnam dan Fukuyama memperjelas dengan memperluas batasan bahwa modal sosial tidak pada individu, tetapi pada kelompok, komunitas, bahkan di tingkat negara. Dikatakan bahwa komunitas berbeda dengan individu yang memiliki jumlah modal sosial tertentu. Komunitas mampu membangun modal sosial melalui pengembangan hubungan aktif, partisipasi demokrasi dan penguatan dan kepemilikan dan kepercayaan komunitas (Linda, 2002: 7-8).

Modal sosial dapat diartikan sebagai norma dan hubungan sosial yang menyatu dalam struktur sosial masyarakat yang mampu mengkoordinasikan tindakan dalam mencapai tujuan. (Linda, 2002: 6-7). Meskipun kekuatan modal sosial telah lama banyak diakui dalam kehidupan sehari-hari, sebagai konsep ilmu sosial yang baru dipandang penting pada tahun-tahun terakhir. Konsep ini menarik perhatian karena beberapa alasan. Sebagian, hal ini mempresentasikan reaksi terhadap apa yang kini dipandang sebagai individualisme berlebihan para pembuat kebijakan pada tahun-tahun kekuasaan.

Hakikat modal sosial adalah hubungan sosial yang terjalin dalam kehidupan sehari-hari warga masyarakat. Hubungan sosial mencerminkan hasil interaksi sosial dalam waktu yang relatif lama sehingga menghasilkan jaringan, pola kerjasama, pertukaran sosial, saling percaya, termasuk nilai dan norma yang mendasari hubungan sosial tersebut.

2.1.6 Unsur-Unsur Modal Sosial

Putnam (2011) mendefinisikan modal sosial sebagai bagian dari organisasi sosial, seperti kepercayaan, norma, dan jaringan, yang dapat memperbaiki efisiensi masyarakat untuk kepentingan bersama. Selain itu modal sosial juga memiliki 3 unsur yaitu sebagai berikut:

1) Jaringan

Modal sosial merupakan sumber daya yang melekat dalam hubungan sosial. Peluang untuk memanfaatkan modal sosial dapat ditingkatkan dengan menjalin hubungan sosial sebanyak mungkin. Lin (2001) menyatakan sebagai investasi modal sosial. Investasi modal sosial yang dilakukan sejak dini akan memperluas dan memperkuat jejaring sosial yang dimiliki. Manfaat hubungan sosial mungkin tidak secara langsung dirasakan karena kualitas hubungan sosial yang terbentuk juga menentukan besaran manfaat yang dapat diperoleh. Oleh karena itu, investasi modal sosial termasuk pula memelihara hubungan antar pribadi dengan interaksi sosial yang baik berdasarkan norma dan nilai-nilai kepercayaan yang berlaku dalam masyarakat.

Menurut Mustofa (2014: 6) tingkatan antar individu, jaringan sosial dapat didefinisikan sebagai rangkaian hubungan yang khas diantara sejumlah orang dengan sifat tambahan yang ciri-ciri dari hubungan ini digunakan untuk melihat tingkah laku sosial dari individu-individu yang terlibat. Dalam memperoleh manfaat modal sosial, setiap individu harus memelihara dan memperluas jejaring sosial, keduanya dapat dilakukan dengan menjadi bagian dalam kelompok sosial dan aktif berpartisipasi dalam berbagai kegiatan. Semakin besar dan banyak jejaring sosial yang terbentuk, semakin terbuka kesempatan seseorang untuk

mengakses dan memanfaatkan modal sosial yang ada dalam jejaring. Kekuatan jaringan tergantung dari sudut apa jaringan tersebut, yaitu pertimbangan asal dan berada pada tingkat mana jaringan tersebut. Jaringan masyarakat paling kuat dan paling tebal pada tingkat tujuan dan berlanjut menjadi lemah ketika melihat pada tingkatan daerah, nasional dan internasional.

2) Kepercayaan

Menurut Mustofa (2014:3) rasa percaya merupakan unsur utama pembentuk modal sosial, tanpa adanya rasa percaya antar individu, maka sulit terjadi interaksi sosial apalagi hubungan sosial yang baik. Model modal sosial yang dikemukakan oleh Nan Lin (1999) memposisikan rasa percaya sebagai salah satu aset kolektif yang mempengaruhi akses individu terhadap sumber daya di dalam jaringan. Kepercayaan antar individu dalam suatu hubungan sosial dapat dipandang dalam dua sisi yang berbeda, yaitu sebagai input sekaligus output modal sosial. Grootaert, dkk (2004) menyebutkan rasa percaya merupakan input modal sosial karena dengan adanya rasa saling percaya antar individu menjadi landasan terjalannya interaksi sosial yang mengarah kepada hubungan sosial yang lebih erat antar anggota masyarakat.

Kepercayaan merupakan perwujudan dari modal sosial kognitif yang dapat tercermin dari persepsi sikap percaya individu terhadap anggota komunitas. Pada lingkup mikro seperti masyarakat desa, sikap percaya tercermin dalam interaksi sosial sehari-hari antar anggota masyarakat yang bersifat vertikal maupun horizontal. Selain itu, modal sosial kognitif juga tercermin dari sikap toleransi antar anggota masyarakat yang tergambar dalam kerukunan hidup bermasyarakat.

Fukuyama (2002:36) mengatakan unsur utama dan terpenting dari modal sosial adalah kepercayaan (trust). Kepercayaan yaitu norma-norma kooperatif seperti kejujuran dan kesediaan yang bisa dibagi-bagi antara kelompok-kelompok masyarakat terbatas dengan lainnya dalam masyarakat yang sama. Kepercayaan merupakan sebuah harapan yang tumbuh di dalam masyarakat, organisasi, dan perusahaan yang ditunjukkan dengan perilaku jujur, teratur, dan kerjasama berdasarkan norma-norma yang dianut secara bersama demi kepentingan anggota didalamnya. Fukuyama mengatakan bahwa kepercayaan adalah efek samping yang sangat penting dari norma-norma sosial yang kooperatif yang memunculkan social capital.

6) Norma

Norma adalah sekumpulan aturan yang diharapkan dipatuhi dan diikuti oleh anggota masyarakat pada suatu entitas sosial tertentu. Menurut Hasbullah aturan-aturan kolektif tersebut biasanya tidak tertulis tapi dipahami oleh setiap anggota masyarakat dan menentukan pola tingkah laku yang diharapkan dalam konteks hubungan sosial. Menurut Fukuyama, norma merupakan bagian dari modal sosial yang terbentuknya tidak diciptakan oleh birokrat atau pemerintah.

Norma terbentuk melalui tradisi, sejarah, tokoh kharismatik yang membangun sesuatu tata cara perilaku seseorang atau sesuatu kelompok masyarakat, didalamnya kemudian akan timbul modal sosial secara spontan dalam kerangka menentukan tata aturan yang dapat mengatur kepentingan pribadi dan kepentingan kelompok (Mustofa, 2014: 3).

2.1.7 Kinerja Koperasi

Pengukuran kinerja perusahaan dilakukan perbaikan dan pengendalian atas kegiatan operasionalnya agar dapat bersaing dengan perusahaan lainnya. Selain itu, pengukuran kinerja juga dibutuhkan untuk penetapan strategi yang tepat dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. Dengan kata lain mengukur kinerja perusahaan merupakan fondasi tempat berdirinya pengendalian efektif. Yang terdiri dari indikator kinerja yaitu:

1) Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan suatu perusahaan dapat diartikan sebagai prospek atau masa depan, pertumbuhan, dan potensi perkembangan yang baik bagi perusahaan. Informasi kinerja keuangan di perlukan untuk menilai perubahan potensial sumber daya ekonomi, yang mungkin dikendalikan di masa depan dan untuk memprediksi kapasitas produksi dari sumber daya yang ada (Barlian, 2003). Pimpinan perusahaan atau manajemen sangat berkepentingan terhadap laporan keuangan yang telah dianalisis, karena hasil tersebut dapat dijadikan sebagai alat dalam pengambilan keputusan lebih lanjut untuk masa yang akan datang.

Dengan menggunakan analisis rasio, berdasarkan data dari laporan keuangan, akan dapat diketahui hasil-hasil finansial yang telah dicapai di waktu-waktu yang lalu, dapat diketahui kelemahan-kelemahan yang dimiliki perusahaan, serta hasil-hasil yang di anggap cukup baik. Kinerja keuangan biasanya diukur dengan menggunakan rasio-rasio keuangan dan analisis.

2) Kinerja Manajemen

Kinerja Manajemen adalah aktivitas untuk memastikan saran organisasi telah dicapai secara konsisten dalam cara-cara yang Efektif dan efisien. Kinerja manajemen bisa berfokus pada kinerja dari suatu organisasi, departemen, karyawan, atau bahkan proses untuk menghasilkan produk atau layanan, dan juga di area yang lain. Baik ditingkat organisasi ataupun individu, salah satu fungsi kunci dari manajemen adalah mengukur dan mengelola kinerja. Kinerja manajemen dapat diukur dengan menggunakan prinsip-prinsip manajemen.

Penilaian kinerja koperasi sangat penting untuk setiap *stakeholders* koperasi yaitu manajemen koperasi, nasabah, anggota koperasi. Koperasi yang dapat menjaga kinerjanya dengan baik terutama tingkat profitabilitasnya yang tinggi dan mampu membagikan deviden dengan baik serta prospek usahanya dapat selalu berkembang, sehingga dapat menambah kepercayaan masyarakat dan calon anggota kepada koperasi yang bersangkutan.

Kinerja koperasi sendiri terkait erat dengan Tingkat Kesehatan koperasi, Kinerja koperasi dikatakan baik pada saat penilaian keseluruhan aspek keuangan berpredikat sehat. Kondisi koperasi seperti yang tertuang dalam peraturan Menteri Koperasi Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 14/Per/M.KUKM/XIV/2009. Penilaian kesehatan koperasi ditinjau dari beberapa aspek yakni aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, serta jati diri koperasi. Masing-masing diberi skor dan bobot yang telah ditentukan. Selanjutnya dapat ditentukan tingkat kesehatan koperasi meliputi aspek:

a) Permodalan

Pasal 41 Undang -Undang Pekonomian Nomor 25 tahun 1992 disebutkan bahwa modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri dapat berasal dari simpanan pokok. Simpanan wajib, dana cadangan dan hibah. Modal pinjaman dapat berasal dari anggota koperasi lainnya atau anggotanya, penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya dan sumber lainnya yang sah. Aspek pertama penilaian kesehatan koperasi adalah permodalan penilaian permodalan dilakukan dengan menggunakan dua rasio permodalan yaitu perbandingan modal sendiri dengan asset dan rasio kecukupan modal.

b) Manajemen

Pada dasarnya manajemen koperasi tidak jauh berbeda dengan manajemen perusahaan perdagangan dan perusahaan non bank yang lain. Fungsi manajemen perusahaan berikut juga diterapkan dalam manajemen koperasi. Manajemen menunjukkan pada orang berarti berkaitan dengan para pengelola yang ada dalam organisasi, kaitannya dengan koperasi berarti menunjuk pada apa yang sering kita sebut perangkat organisasi koperasi. Menurut UU No. 25 Tahun 1992, yang termasuk perangkat organisasi adalah rapat anggota, pengurus dan pengawasan. Penilaian aspek manajemen meliputi beberapa komponen yaitu manajemen umum, kelembagaan, manajemen permodalan, manajemen aktiva, dan manajemen likuiditas.

c) Efisiensi

Rasio ini menggambarkan sampai seberapa besar koperasi mampu memberikan pelayanan yang efisien kepada anggotanya dari penggunaan aset yang dimilikinya, sebagai penggantinya ukuran rentabilitas untuk badan usaha koperasi dinilai kurang tepat. Rentabilitas koperasi hanya untuk mengukur keberhasilan perusahaan koperasi yang diperlukan dari penghematan biaya pelayanan.

d) Likuiditas

Likuiditas adalah berhubungan dengan masalah kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya yang segera harus dipenuhi. Dalam hal ini adalah kemampuan koperasi untuk memenuhi kewajiban jangka pendek.

e) Kemandirian dan Pertumbuhan

Aspek ini didasarkan pada rentabilitas aset, rentabilitas ekuitas, dan kemandirian operasional. Dalam hal ini penilaian tingkat kesehatan koperasi terhadap kemandirian dan pertumbuhan.

f) Jati Diri Koperasi

Jatidiri koperasi, setelah perhitungan penilaian terhadap 7 komponen sebagaimana dimaksud 1 sampai 7 aspek diatas, sehingga diperoleh skor secara keseluruhan. Skor yang dimaksud dipergunakan untuk menetapkan predikat tingkat kesehatan koperasi yang dibagi dalam empat golongan yaitu, sehat, cukup sehat, kurang sehat, dan tidak sehat. Penetapan Predikat Tingkat Kesehatan

Koperasi Menurut Sumber Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Republik Indonesia No. 14/Per/M.KUKM/XII/200:

- a) 80-100 = Sehat
- b) 60-80 = Cukup Sehat
- c) 40-60 = Kurang Sehat
- d) 20-40 = Tidak Sehat

2.2 Hasil Penelitian Sebelumnya

Beberapa hasil penelitian sebelumnya yang digunakan sebagai referensi dalam penelitian ini adalah penelitian Evi (2018) yang berjudul Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Pengendalian Internal terhadap Kinerja Pemerintah menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah, transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah dan pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan Utari dan Yeni (2017) yang berjudul menguji pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Anggaran Pada Pemerintah Kabupaten Kota Denpasar menunjukkan bahwa secara parsial akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja anggaran pada Pemerintah Kota Denpasar, transparansi secara parsial berpengaruh positif terhadap kinerja anggaran pada Pemerintah Kota Denpasar dan partisipasi anggaran secara parsial berpengaruh positif terhadap kinerja anggaran pada Pemerintah Kota Denpasar.

Lalu, ada penelitian dari Daniel (2014) yang berjudul Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Responsibilitas Pengelolaan Keuangan Sekolah

Terhadap Kinerja Guru menunjukkan bahwa transparansi secara parsial berpengaruh positif terhadap kinerja guru, akuntabilitas secara parsial tidak berpengaruh terhadap kinerja guru, responsibilitas berpengaruh terhadap kinerja guru.

Selain itu penelitian Dito (2018) yang berjudul Analisis Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah menunjukkan secara parsial pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Dan juga secara parsial akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Transparansi secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Penelitian Rosy dkk (2014) yang berjudul Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Pada Industri Perbankan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia menunjukkan bahwa *good corporate governance* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan Perusahaan pada Industri Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh Desy dan Pande (2017) yang berjudul Pengaruh Prinsip- Prinsip *Good Corporate Governance*, Motivasi Dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan menunjukkan hasil bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan, independensi berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan, sedangkan transparansi berpengaruh negatif terhadap kinerja karyawan dan responsibilitas berpengaruh negatif terhadap kinerja karyawan dan kewajaran berpengaruh negatif terhadap kinerja karyawan.

Penelitian Nurmaria dkk (2015) yang berjudul Pengaruh Penerapan *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan menunjukkan hasil bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, tanggung jawab berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, Independensi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, kewajaran berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Dyah dan Asry (2016) yang berjudul Pengaruh Prinsip – Prinsip *Good Corporate Governance* Pada Kinerja Keuangan Di Kabupaten Klungkung menunjukkan hasil bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, tanggung jawab berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, independensi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, kewajaran berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.

Penelitian Krishna dan Asry (2017) yang berjudul Pengaruh Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Di Kota Denpasar menunjukkan hasil bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kota Denpasar, independensi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kota Denpasar, kewajaran berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kota Denpasar, namun berbeda hasil dengan transparansi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kota Denpasar, tanggung jawab berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kota Denpasar,

Penelitian Jayanti dkk (2016) yang berjudul Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja (Studi Pada Karyawan PT Pos Indonesia (Persero Tuban) menunjukkan hasil bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan, akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan, responsibilitas berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan, independensi berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan, kewajaran berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Penelitian yang dilakukan oleh Tommy (2017) yang berjudul Pengaruh Dimensi- Dimensi Modal Sosial Terhadap Kinerja Individu Mahasiswa- Mahasiswa *Guild Family Business* Universitas Ciputra menunjukkan hasil bahwa dimensi struktural modal sosial berpengaruh signifikan terhadap kinerja individu, dimensi relasional modal sosial berpengaruh signifikan terhadap kinerja individu, dan dimensi kognitif modal sosial berpengaruh signifikan terhadap kinerja individu.

Penelitian Yosua dkk (2013) yang berjudul Pengaruh Modal Sosial Dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Tenaga Medis Di RSUD Kabupaten Kepulauan Talaud menunjukkan hasil bahwa modal sosial berpengaruh positif terhadap kinerja tenaga medis di RSUD Kabupaten Kepulauan Talaud, budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja tenaga medis di RSUD Kabupaten Kepulauan Talaud. Penelitian Oka dan Widnyana (2018) yang berjudul Pengaruh Modal Sosial Terhadap Kinerja Usaha Pada UD Udiana, Ds Celuk, Gianyar Bali menunjukkan bahwa hasil modal sosial berpengaruh positif terhadap kinerja usaha pada UD Udiana, Ds Celuk, Gianyar Bali. Penelitian Layla dan Lindawati (2014) yang berjudul Pengaruh Modal Insani dan Modal Sosial Terhadap Kinerja (Studi Kasus Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Makana dan

Minuman Kota Bogor) yang menunjukkan hasil bahwa modal sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja dan modal insani berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja.

Terakhir ada penelitian dari Abdi (2019) yang berjudul Pengaruh Modal Sosial Terhadap Peningkatan Kinerja Pada UMKM Rumah Makan di Kota Tentena Kabupaten Poso menunjukkan hasil bahwa modal sosial secara keseluruhan signifikan kurang berpengaruh positif terhadap kinerja UMKM. Penelitian Eva dan Dewie (2014) yang berjudul Pengaruh Modal Sosial, Keterlibatan Kerja Karyawan Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan menunjukkan hasil bahwa modal sosial tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan, keterlibatan kerja memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan dan komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama meneliti pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi Kewajaran dan Modal Sosial terhadap kinerja koperasi. Selain itu, teknik analisis yang digunakan yaitu sama-sama menggunakan analisis regresi linier berganda. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada jenis perusahaan yang digunakan dan tahun pengamatan.